

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amirudin dan Zinal Asdikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Abdul Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019.
- Abdul Ghoffar, *Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia*, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Heo Yun, *Theory of Constitutional Litigation Law (Hukum Acara Peradilan Konstitusi)*, Seoul: Park Young Sa, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kim Changrok, *History of the Korean Constitution (Sejarah Konstitusi Korea)*, Seoul: Beopmunsa, 2015.
- Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Siahaan, Philipus M. Hadjon, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2012.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.

Stout, H.D., Inleiding tot het Nederlands Staatsrecht, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1958.

Sumadi, Ahmad Fadlil, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1986.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 (Cet. ke-3).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan .

Undang-Undang Organisasi Pengadilan Korea Selatan.

Undang-Undang Acara Perdata Keluarga Korea Selatan.

Undang-Undang Acara Administrasi Korea Selatan.

Undang-Undang Paten Korea Selatan.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Undang-Undang Disiplin Hakim.

Undang-Undang tentang Kasus-kasus Khusus mengenai Prosedur Pengadilan oleh Mahkamah Agung.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P-KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam perkara PHPU.

### **C. Jurnal**

Amal Sethi, Constitutional Transition and the Travail of Judges: The Courts of South Korea, *Asia Pacific Law Review*, 2022.

Chofifi, N. A., & Kusdarini, E., Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31/No. 2/2024.

Jamaludin Ahmad, Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15/No. 1/2017, 46.

Seon Seung Yong, Request for the Expansion of the Constitutional Court's Authority (Kelayakan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi), (Tesis), Universitas Yonsei, Seoul, Korea Selatan, 2020.

Webster Timothy, South Korea Shatters the Paradigm: Corporate Liability, Historical Accountability, and the Second World War, *UCLA J. INT'L L. & FOREIGN AFFS.*, 2022.

#### **D. Sumber Online**

Advokat Ini Ingatkan Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilu, *Hukumonline*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-ingatkan-pembentukan-lembaga-peradilan-khusus-pemilu-lt620c79df8680b/>.

Asep Nursobah, Sejarah Kepaniteraan, Artikel Khusus, 2015, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/sejarah-kepaniteraan>.

Diskusi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan, Bagja: Itu Amanat Undang-Undang, *Bawaslu RI*, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/diskusi-pembentukan-peradilan-khusus-pemilihan-bagja-itu-amanat-undang-undang>.

Edi Abdullah, Pasca Putusan MK - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, <https://lan.go.id/?p=16877>.

Herald Corporation, KPU: Gugatan Penolakan Hasil Pilpres Ditolak Sepenuhnya. Kubu Lee Jae-myung: Kepercayaan terhadap Lembaga Peradilan Runtuh, 2024, <https://biz.heraldcorp.com/article/2810852>.

Hukumonline, MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024, Lampung 2019, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kabulkan-44-perkara-phpu-legislatif-tahun-2024-lampau-2019-lt666aeab06afb3/?page=1>.

Kompas, PHPU Pilpres Hanya 10 Hari Kerja, MK Siap Revisi, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/15/phpu-pilpres-hanya-10-hari-kerja-mk-siap-revisi>.

KBBI Daring. (2024). *Wewenang*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=145&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PHPU>.

Pemilu Curang 15 Maret dan Pengadilan Khusus, Arsip Nasional Korea, diakses dari [https://theme.archives.go.kr/next/history/samilos/sub2\\_2\\_2.do](https://theme.archives.go.kr/next/history/samilos/sub2_2_2.do).

Supreme Court of Korea.(2016). *Courts*. <https://www.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/courts.jsp>.